

**LAMPIRAN II**  
**RENCANA KERJA PENATAAN RUANG UNTUK PEMANTAPAN KEAMANAN NASIONAL**  
**(PENANGANAN KAWASAN PERBATASAN)**

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	INDONESIA – MALAYSIA. Panjang perbatasan ± 1.914.507 Km (Kab. Sanggau Kalbar, Tebedu Sarawak) sampai dengan (Kab. Nunukan Kaltim, Sabah Malaysia Timur).	Garis batas laut dan darat.  - <b>Di Darat.</b> Ketidakcocokan kesepakatan bersama tentang garis batas : a. Wilayah Kalbar-Serawak ada 5 titik, dan wilayah Kaltim – Sabah ada 5 titik.  b. Tugu batas banyak yang rusak atau dipindahkan  c. Adanya patok-patok perbatasan yang rusak/hilang	1. <u>Departemen Pertahanan (Action Plan)</u>  - Menentukan posisi/lokasi dan merencanakan pembangunan pos-pos penjagaan dan pengawasan untuk kepentingan keamanan, khususnya di 10 (sepuluh) titik bermasalah.  - Meningkatkan frekuensi patroli laut rutin terhadap pulau-pulau terluar baik yang berpenghuni maupun tidak, termasuk perbatasan darat.  - Mengawasi patok-patok yang telah ditentukan/disepakati bersama  2. <u>Departemen Luar Negeri (saran)</u>  - Melaksanakan perundingan secara bilateral untuk menetapkan kejelasan batas wilayah kedaulatan.	- Anggaran APBN pelaksana Depdagri/Dep. PU.  - Gelar kekuatan dinamis (TNI) sebagai wujud diplomasi TNI/ deterrent effect.  Terkait : Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Depkeu, Depkes, Deptan, DPR

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
		<p>- Di Laut.</p> <p>a. Batas laut Teritorial Malaysia di bagian utara Selat Malaka.</p> <p>b. Batas laut Teritorial P. Bintan (Ind) dengan Johor Timur (Malaysia) dengan jarak kurang lebih 11 mil laut.</p> <p>c. Batas landas Kontinen Indonesia- Malaysia di Laut Cina Selatan</p> <p>d. Batas laut teritorial dan landas Kontinen disebelah timur P. Sebatik.</p> <p>e. Batas laut Teritorial</p>	<p>- Perkuatan kerjasama pertahanan perbatasan dengan negara berdam-pingan mengembangkan pos-pos pemeriksaan lintas batas di pusat-pusat pengembangan ekonomi dalam wilayah kawasan perbatasan negara di Kalimantan</p> <p>3. <u>Departemen Dalam Negeri (saran)</u></p> <p>- Menyiapkan dukungan data yang akurat kepada Deplu (Data Perbatasan).</p> <p>- Menambah/membangun dan mem-perbaiki patok/tanda batas yang rusak.</p> <p>- Merencanakan pembangunan "kawasan sabuk pengaman" di sepanjang perbatasan</p> <p>4. <u>Departemen Kehutanan (saran)</u></p> <p>- Meningkatkan koordinasi dengan aparat TNI dalam pengawasan lingkungan.</p> <p>5. <u>Departemen Pekerjaan Umum (saran)</u></p>	<p>- Kriteria akan ditentukan bersama</p>

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
		<p>dan landas Kontinen di Laut Sulawesi</p>	<p>- Membangun sarana prasarana wilayah didaerah perbatasan untuk mendukung operasional gelar kekuatan dan pengawasan perbatasan.</p> <p>6. <u>Kementerian Koordinator Polhukam (saran)</u></p> <p>- Mengusulkan kepada Presiden tentang pembentukan <u>Badan Tetap Inter Departemen</u> yang khusus menangani kawasan perbatasan agar lebih fokus, dan terintegrasi</p>	

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
		<p>b. Tugu batas banyak yang rusak atau dipindahkan</p> <p>c. Adanya patok-patok perbatasan yang rusak/hilang</p> <p><b>- Di Laut.</b></p> <p>a. Batas Maritim di utara Selat Malaka.</p> <p>b. Batas Laut P. Bintan dengan Johor Timur (<math>\pm 11</math> mil laut.)</p> <p>c. Batas Landas Kontinen di Laut Cina Selatan.</p> <p>d. Batas Maritim akibat Sipadan &amp; Ligitan lepas</p> <p>e. Batas Maritim dan landas Kontinen disebelah timur P. Sebatik.</p>	<p>2. <u>Departemen Luar Negeri (saran)</u></p> <p>- Melaksanakan perundingan secara bilateral untuk menentukan batas wilayah.</p> <p>3. <u>Departemen Dalam Negeri (saran)</u></p> <p>- Merencanakan konsep pembangunan terintegrasi dg bang. Han di wiltas</p> <p>4. <u>Departemen Kehutanan (saran)</u></p> <p>- Meningkatkan koordinasi dengan TNI dalam pengawasan lingkungan</p>	<p>- Perlu mendapat dukungan sumber daya nasional di daerah tersebut.</p> <p>- Aparat dibantu seluruh komponen bangsa.</p>

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
2.	INDONESIA – PHILIPINA.	<p>f. Batas Maritim dan landas Kontinen di Laut Sulawesi</p> <p>a. Penetapan batas maritim.</p> <p>b. Pengamanan navigasi.</p> <p>c. Kejahatan lintas negara.</p> <p>d. Usulan Philipina untuk mengamandemen Unclos'82</p>	<p><u>1. Departemen Pertahanan (Action Plan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan patroli perbatasan di laut secara intensif.</li> <li>- Menambah penempatan aparat TNI dalam rangka meningkatkan efektifitas gelar kekuatan.</li> </ul> <p><u>2. Departemen Luar Negeri (saran)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melanjutkan perundingan bilateral/ kerjasama melalui forum JBC (Joint Border Committee) dan JCBC (Joint Commission For Bilateral Cooperation).</li> <li>- Melaksanakan kaji ulang bersama Philipina terhadap pasal-pasal UNCLOS' 82 sesuai pasal 312 dan 313, yang berisi tentang usulan amandemen dan usulan amandemen dengan prosedur yang disederhanakan.</li> </ul>	<p>Rencana penataan ruang wilayah pertahanan diprioritaskan pada penataan dislokasi dan penambahan kekuatan</p>

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
3.	INDONESIA – PAPUA NUGINI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kehidupan tradisional masyarakat perbatasan yang berkenaan dengan budaya dan ulayat</li> <li>- Persoalan gangguan keamanan</li> <li>- Persoalan pelintas batas.</li> <li>- Persoalan geografi</li> </ul>	<p><u>3. Departemen Dalam Negeri, Dephan dan Bakosurtanal (saran)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan RUU batas negara.</li> <li>- Menyusun titik-titik koordinat di laut sesuai dengan data yang dimiliki.</li> </ul> <p><u>4. Departemen Kelautan Dan Perikanan (saran)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama dgn TNI dalam atasi kejahatan lintas negara di laut.</li> </ul> <p><u>1. Departemen Pertahanan (Action Plan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan redислоkasi satuan jajaran TNI.</li> <li>- Menyusun rencana tata ruang wilayah: rencana tata ruang wilayah pertahanan darat, laut dan udara untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional.</li> </ul> <p><u>2. Departemen Luar Negeri (saran)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Administrative Border Arrangement tahun 1973 tentang kehidupan sosial budaya masyarakat di perbatasan</li> </ul>	Rencana penataan ruang wilayah pertahanan diprioritaskan pada penataan dislokasi kekuatan, dengan pertimbangan politik dan atau strategi militer

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
4.	INDONESIA - TIMOR LESTE	<p>- Terdapat 2 (dua) daerah Ambique (diragukan) kepemilikannya yaitu Noel Besi dan Manusasi</p> <p>- Permasalahan lain: proses demarkasi dan delineasi belum dilanjutkan lagi.</p>	<p><u>3. Departemen Dalam Negeri (saran)</u></p> <p>- Menyesuaikan perencanaan tata ruang Propinsi/Kabupaten/Kota dengan kebutuhan pertahanan.</p> <p><u>1. Departemen Pertahanan (Action Plan)</u></p> <p>- Meningkatkan kinerja pos-pos pengaman sepanjang perbatasan darat.</p> <p>- Meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan.</p> <p>- Mengkaji pembangunan Satuan TNI AL di Wini dan Atapupu.</p> <p>- Merencanakan redislokasi satuan jajaran TNI khususnya pada daerah rawan/strategis</p> <p><u>2. Departemen Luar Negeri (saran)</u></p> <p>- Melakukan koordinasi dengan anggota Panitia Nasional yang lebih intensif</p>	Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik dan atau strategi militer

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
5.	INDONESIA - AUSTRALIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan garis batas laut setelah lepasnya Timor Leste</li> <li>- Nelayan Tradisional</li> <li>- People Smuggling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Forum JBC (Joint Border Committee) untuk menentukan kriteria/persyaratan kepemilikannya.</li> <li>- Meyakinkan melalui jalur diplomatis mengacu kepada hukum internasional dan kebiasaan internasional untuk menangani permasalahan tersebut.</li> </ul> <p><u>1. Departemen Pertahanan (Action Plan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengangkat perlunya perundingan Trilateral (BP Pertahanan)</li> <li>- Meningkatkan frekuensi operasi Kamla</li> </ul> <p><u>2. Departemen Luar Negeri (saran)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendesak Australia untuk berunding kembali dalam wadah Trilateral.</li> </ul> <p><u>3. Departemen Dalam Negeri (saran)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan RTRWP/K/K pasca Timor Leste merdeka.</li> </ul>	Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik dan atau strategi militer

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
6.	INDONESIA - SINGAPURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya kesepakatan pada 3 titik koordinat disebelah barat dan 3 titik koordinat di sebelah timur Selat Singapura.</li> <li>- Dampak reklamasi pantai Singapura yang menggunakan pasir laut dari wilayah Indonesia terhadap garis batas maritim.</li> <li>- Transnational crime.</li> <li>- Belum adanya perjanjian ekstradisi.</li> <li>- FIR (Flight Information Region)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Departemen Luar Negeri (saran)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat perundingan secara trilateral (Indonesia-Malaysia-Singapura) untuk menentukan batas maritim.</li> <li>- Menekan Singapura untuk segera membuat perjanjian ekstradisi.</li> </ul> </li> <li>2. <u>Departemen Pertahanan</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memelihara koordinat titik dasar (base point) dan merencanakan kegiatan pendataan dan penentuan batas maritim.</li> <li>- Merencanakan kegiatan patroli maritim dan udara secara rutin oleh unsur TNI.</li> </ul> </li> <li>3. <u>Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Pemerintah Daerah Riau (saran)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghentikan kegiatan penambangan pasir laut.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik, strategi militer, persepsi ancaman terhadap Kamnas, dan dislokasi kekuatan</p>

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
			<p>4. <u>Departemen Perhubungan, Departemen Pertahanan dan LAPAN (Saran)</u></p> <p>-Melaksanakan kaji ulang terhadap MoU penggunaan FIR, dengan sasaran agar tidak mengorbankan kepentingan nasional.</p>	
7.	INDONESIA – REPUBLIK PALAU	- Belum adanya kesepakatan batas ZEE dan Landas Kontinen.	<p>1. <u>Departemen Luar Negeri (saran)</u></p> <p>-Melaksanakan perundingan secara bilateral untuk menentukan batas laut.</p> <p>2. <u>Departemen Pertahanan</u></p> <p>-Merencanakan kegiatan pendataan dan penentuan batas laut.</p> <p>-Merencanakan kegiatan patroli laut dan udara secara rutin oleh unsur TNI.</p> <p>3. <u>Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Papua (saran)</u></p> <p>-Merencanakan pendataan dan pembangunan di pulau-pulau terluar di utara Papua.</p>	Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik dan atau strategi militer

NO	WILAYAH PERBATASAN	PERMASALAHAN	RENCANA KERJA	KETERANGAN
8.	INDONESIA – THAILAND	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya kesepakatan batas laut ZEE dan Landas Kontinen di Utara Selat</li>   <li>Malaka dan Laut Cina Selatan.</li>   <li>- Transnational crime.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Departemen Luar Negeri (saran)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan perundingan secara bilateral untuk menentukan batas laut.</li> </ul> </li>   <li>2. <u>Departemen Pertahanan</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Merencanakan kegiatan pendataan dan penentuan batas laut.</li>   <li>-Merencanakan kegiatan patroli laut dan udara secara rutin oleh unsur TNI.</li> </ul> </li> </ol>	Rencana penataan ruang Wilhan diutamakan pada pertimbangan politik dan atau strategi militer

**A.n. MENTERI PERTAHANAN  
SEKRETARIS JENDERAL,**

**SUPRIHADI, S.IP**